

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, M. K. S. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum Dan Setelah Otonomi Daerah*. Tesis tidak diterbitkan. Medan: Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (Online), (<http://www.bpk.go.id/web/files/2012/10/IHPS-sem1-2012.pdf>, diakses 7 Februari 2013).
- Bisri, Hasan. 2008. *Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Pejabat Eselon II Pemerintah Daerah*. Slide disajikan dalam Penataran Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Pejabat Eselon II Pemerintah Daerah Angkatan XIX, Jakarta 20 Juni 2008.
- Direktorat Aparatur negara. 2006. *Manajemen Yang Berorientasi Pada peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fabanyo, Suriyanti. 2011. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Google Market. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Android*. (Online), (<http://googlemarket/kbbi>, diakses 18 Juni 2012).
- Krina P. Lalolo Loina. 2003 *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, (Online), (http://goodgovernance.bappenas.go.id/gg/file/concept/good_governance.pdf, diakses 13 september 2012).
- Lexy J. Moleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mifti Sri, Lestraiyo N. B, Kowanda Anacosita. 2009. *Pengawasan Internal dan Kinerja (Suatu Kajian di Kantor Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri)*, (Online), Vol. 14, No.3, (<http://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/viewFile/312/252>, diakses 1 Desember 2012).

Murwanto, Rahmadi, Budiarsi, Adi, Ramadhana, F. H. 2005. *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Publik Dan Akuntansi Pemerintah Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 2007. Jakarta: Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo. 2008. Sengkang: Sekertariat Daerah Kabupaten Wajo.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis organisasi dan tata kerja Inspektorat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2007. Jakarta : Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 2005. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2008. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 2004. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2004. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2000 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sangadji. 2010. *Metodologi Penelitian*. Malang : Penerbit Andi.

Sekretariat Tim pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintah yang Baik-Bapenas, (2007). *Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan Yang Baik Kementerian Negara Perencanaan Pemabangunann Nasional/Bappenas.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi, Pedoman Penulisan Skripsi. 2012. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Undang-undang Republik Indonesia Nomr 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara . 2004. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Wahda, B. A. 2011. *Upaya Masyarakat Dalam Pencegahan Bencana Banjir Musiman di Kelurahan Mattiro Tappareng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Sripsi Tidak diterbitkan.* Bandung: Jurusan Pengembangan Sosial Masyarakat Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.

Yeramis T, Keban. 2000. *Good Governance dan Capacity Building Sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintah,* (Online), (<http://www.bappenas.go.id/node/48/2389/good-governance-dan-capacity-building-sebagai-indikator-utama-dan-fokus-penilaian-kinerja-pemerintahan-oleh-yeremias-t-keban/>, dikases 10 November 2012)

LAMPIRAN

Lampiran Pedoman Wawancara

1. Identitas Informan

- a. Nama :
- b. Instansi :
- c. Jabatan :
- d. Pendidikan :

2. Pertanyaan Wawancara

- a. Dari data IHPS Semester 1 Tahun 2012 masih terdapat tujuh rekomendasi yang belum ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah, rekomendasi apa saja yang belum ditindak lanjuti tersebut ?
- b. Mengapa rekomendasi tersebut belum ditindak lanjuti oleh pemda ?
- c. Apakah ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemda tentang pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Fungsional (BPK) ?
- d. Bagaimana gambaran Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang selama ini diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo ?
- e. Bagaimana mekanisme dan prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diterapkan selama ini oleh pemerintah daerah ?
- f. Bagaimana mekanisme dan prosedur pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang diterapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo ?

- g. Apakah pelaksanaan kegiatan pemanataan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan(TLHP) BPKdiprogram dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat DaerahKbupatenWajo ?
- h. Bagaimana bentuk kegiatan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang selama ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo?

Lampiran Pedoman Studi Domumentasi

1. Gambaran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo
2. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo
 - a. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo
 - b. Struktur Organisasi
3. Jumlah temuan rekomendasi pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo .
4. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.
5. Surat Ketetapan Bupati Wajo tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut dan Sekertariat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Fungsional.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
8. Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.
9. IHPS BPK Semester I Tahun 2008-2012.